

**ANALISIS PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN RTH PUBLIK KOTA  
BANDAR LAMPUNG TAHUN 2009-2015**

**(Jurnal)**

**Oleh:**

**Nanda Satriana Ikhsanuddin P.**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2015**

## ABSTRAK

### ANALISIS PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN RTH PUBLIK KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2009-2015

Nanda Satriana<sup>1)</sup> Yarmaidi<sup>2)</sup> Dedy Miswar<sup>3)</sup>

This study was aimed to: (1) determine the public green-space area of land diversion in Bandarlampung during 2009-2015, (2) analyze the change of the public-green space area use in Bandarlampung during 2009-2015. The method used in this research was quantitative method by spatial approach. Data analysis technique was the technique of digital data analysis by implementing overlay technique. The result of this research indicated that the public green-space area in Bandarlampung during 2009-2015 tended to decrease covered land area of 368.58 ha or 1.87% of the total area captured from the 7 districts. Several factors mostly was caused by preferring diversion of land use to the establishment of public green space interest. Such cases could be as the direct impact of Bandarlampung regional development policy, regional development by the private sector, the establishment of settlements and the establishment of community plantations in public green-space area.

**Keywords:** *Bandarlampung city, land-used diversion, public green-space area*

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui luas perubahan lahan RTH publik di Kota Bandarlampung pada tahun 2009-2015, (2) melakukan analisis perubahan penggunaan lahan ruang terbuka hijau publik di Kota Bandarlampung pada tahun 2009-2015. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan spasial. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data *digital* dengan menggunakan teknik *overlay*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa RTH publik di Kota Bandarlampung pada tahun 2009-2015 telah mengalami penurunan luas lahan sebesar 368,58 ha atau 1,87% dari total luas wilayah pada 7 kecamatan. Faktor-faktor penyebab perubahan penggunaan lahan RTH publik di Kota Bandarlampung dikarenakan kebijakan pembangunan oleh pemerintah daerah, pengembangan wilayah oleh pihak swasta, berdirinya pemukiman, dan terbentuknya perkebunan rakyat pada lahan RTH publik.

**Kata kunci:** kota Bandarlampung, perubahan penggunaan lahan, ruang terbuka hijau (RTH) publik,

Keterangan:

1. Mahasiswa Pendidikan Geografi
2. Dosen Pembimbing 1
3. Dosen Pembimbing 2

## PENDAHULUAN

Proses pembangunan yang terjadi di wilayah perkotaan sedang mengalami perkembangan pesat di seluruh wilayah Indonesia. Pembangunan-pembangunan yang terjadi lebih banyak berupa pembangunan fisik seperti pembangunan berbagai fasilitas perkotaan, perumahan, gedung-gedung, serta sarana dan prasarana transportasi. Pembangunan tersebut berdampak juga pada keberadaan ruang publik di area perkotaan. Menurut Budiharjo (1999), yang dimaksud ruang publik adalah suatu wadah yang menampung aktivitas manusia dalam suatu lingkungan yang tidak mempunyai penutup dalam bentuk fisik.

Sejumlah area di perkotaan mengalami perubahan penggunaan lahan yang diakibatkan adanya proses pembangunan yang terjadi. Perubahan penggunaan lahan adalah fenomena yang tidak dapat dihindarkan dalam kaitannya dengan proses transformasi dalam pengalokasian sumberdaya alam dari satu penggunaan ke penggunaan lainnya (Sugiharto, 2007). Perubahan penggunaan lahan tersebut juga terjadi pada sejumlah ruang terbuka hijau yang berada di kawasan perkotaan.

Ruang terbuka hijau adalah ruang yang didominasi oleh lingkungan alami di luar maupun di dalam kota, dalam bentuk taman, halaman, areal rekreasi kota dan jalur hijau (Roger Trancik, 1986: 61).

Ruang terbuka hijau (RTH) merupakan komponen yang paling penting dalam ekosistem suatu wilayah. Keberadaan ruang hijau bertujuan untuk menjaga kelestarian,

keseerasian, dan keseimbangan ekosistem.

Ruang terbuka hijau memiliki fungsi utama yaitu fungsi bio-ekologis serta fungsi tambahan yaitu fungsi arsitektural, sosial, dan ekonomi. Berlangsungnya fungsi ekologis alami dalam lingkungan perkotaan secara seimbang dan lestari akan membentuk kota yang sehat dan manusiawi (Purnomohadi, 2006).

Penataan ruang terbuka hijau di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mengharuskan penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) minimal 30% dari luas wilayah suatu daerah, dimana 20% merupakan ruang publik dan sebesar 10% ruang privat.

Luas wilayah Kota Bandarlampung sekitar 19.722 hektare, jika berdasarkan peraturan yang menaungi luas RTH suatu wilayah maka Kota Bandarlampung sekurang-kurangnya harus memiliki 5.916 ha untuk RTH dan lahan milik pemerintah sekurang-kurangnya 3.944 ha (20% dari luas wilayah Kota Bandarlampung). Sebagaimana diamanatkan pada UU Nomor 26 Tahun 2007 Pasal 29 ayat (3), bahwa proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah perkotaan paling sedikit dua puluh persen dari luas wilayah kota.

Akan tetapi penyediaan RTH di Kota Bandarlampung saat ini belum mencapai 30% atau setidaknya 20% wilayah publik yang dikelola pemerintah kota. Berdasarkan data Bappeda Kota Bandarlampung pada tahun 2009 RTH publik di Kota

Bandarlampung seluas  $\pm 2.489,80$  ha atau 12,62% dari total luas wilayah Kota Bandarlampung. Memasuki tahun 2012 luasan RTH publik di Kota Bandarlampung mengalami penurunan menjadi  $\pm 2.185,59$  ha dengan luas RTH privat sebesar

289,7 ha. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perubahan penggunaan lahan RTH publik sebesar  $\pm 304,21$  ha. Distribusi RTH di Kota Bandarlampung Tahun 2012 dapat dilihat pada Tabel 1.

**Tabel 1.** Distribusi RTH di Kota Bandarlampung Tahun 2012

No.	Jenis RTH	Luas (Ha)
1.	Taman Kota	19,25
2.	Taman Rekreasi	23,40
3.	Taman Wisata Alam	22,30
4.	Taman Lingkungan Perumahan	2,40
5.	Taman Lingkungan Perkantoran	8,90
6.	Taman Hutan Raya	510,00
7.	Hutan Kota	83,00
8.	Hutan Lindung	350,00
9.	Bentang Alam	745,00
10.	Kebun Binatang	5,80
11.	Pemukaman	40,33
12.	Lapangan Olahraga	25,70
13.	Lapangan Upacara	1,60
14.	Lapangan Parkir	12,70
15.	Lahan Pertanian	278,40
16.	Jalur SUTET	5,60
17.	Sempadan Sungai dan Pantai	0,90
18.	Median Jalan & Pedestrian	43,01
19.	Jalur Hijau	6,50
<b>Total Luas RTH</b>		<b>2.185,59</b>
<b>Luas Total</b>		<b>19.722,00</b>
<b>% Luas RTH</b>		<b>11,08</b>

Sumber: Bappeda Kota Bandarlampung Tahun 2012

Dari Tabel 1 dapat dilihat bahwa persentase luas RTH Kota Bandarlampung sampai dengan tahun 2012 hanya mencapai 11,08%. Jika dibandingkan dengan luas RTH publik Kota Bandarlampung tahun 2009, mengalami penurunan sebesar 1,54% dari luas total wilayah. Luas tersebut belum memenuhi ketentuan luas minimal RTH di perkotaan yang harus mencapai 20% untuk ruang publik. Hal ini dapat terjadi dikarenakan kemungkinan adanya perubahan penggunaan lahan dengan semakin berkembangnya pembangunan di Kota Bandarlampung. Mengingat potensi perubahan penggunaan lahan RTH publik di

Kota Bandarlampung yang cukup tinggi, maka dibutuhkan analisis perubahan penggunaan lahan ruang terbuka hijau publik. Dalam proses pengumpulan dan manipulasi data untuk memperoleh zonasi pemanfaatan ruang terbuka hijau dibutuhkan data penggunaan lahan melalui peta-peta administrasi dan tematik yang membutuhkan waktu cukup panjang dengan proses yang cukup rumit. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui luas perubahan penggunaan lahan RTH publik Kota Bandarlampung Tahun 2009-2015 dan faktor-faktor penyebabnya.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan spasial.

Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2010:13).

Objek dalam penelitian ini adalah kawasan ruang terbuka hijau publik di Kota Bandar Lampung. Unit pemetaan dan unit analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah unit lahan ruang terbuka hijau

publik. Dalam penelitian ini menggunakan variabel tunggal yaitu perubahan penggunaan lahan untuk ruang terbuka hijau publik.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi, observasi, dan survei. Teknik ini dilakukan untuk melihat langsung kondisi variabel penelitian lapangan, dalam hal ini adalah ruang terbuka hijau publik di Kota Bandar Lampung.

Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis data digital dengan menggunakan teknik *overlay* peta pada peta sebaran ruang terbuka hijau tahun 2009 dan 2012 lalu di-*overlay* kembali dengan kondisi peta sebaran ruang terbuka hijau tahun 2015 untuk mendapatkan data perubahan penggunaan lahan RTH yang terjadi di Kota Bandar Lampung sepanjang Tahun 2009-2015.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian dilakukan di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung Tahun 2015. Secara astronomis terletak antara  $105^{\circ}28'$  –  $105^{\circ}37'$  BT dan  $05^{\circ}20'$  –  $05^{\circ}30'$  LS.

### 1. Penggunaan Lahan Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Bandar Lampung Tahun 2009-2015

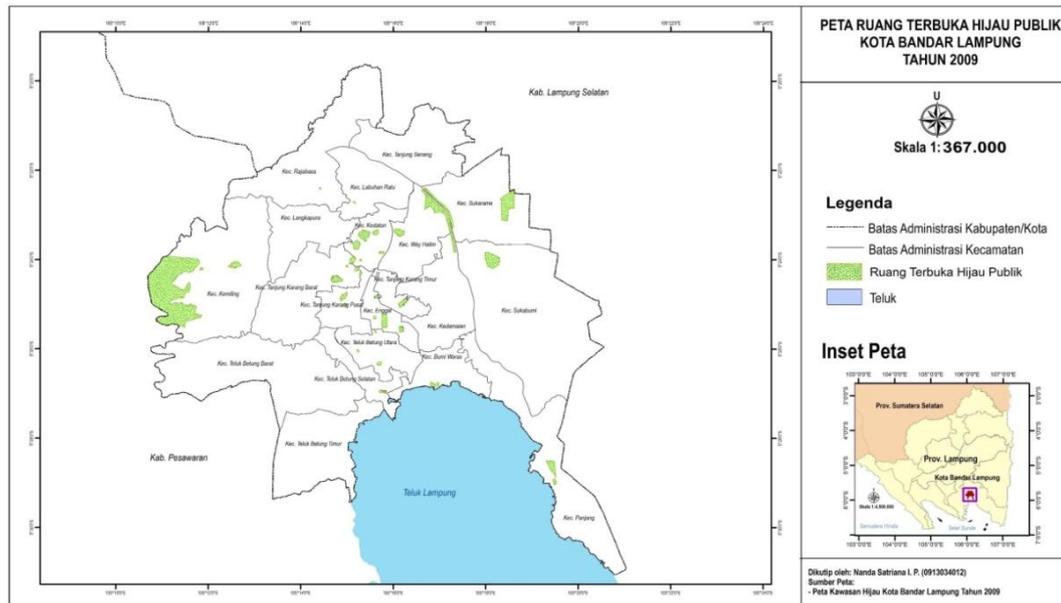
Kota Bandar Lampung sebagai pusat pemerintahan Provinsi Lampung memiliki tingkat perkembangan dari aspek pembangunan yang cukup tinggi. Proses perkembangan pembangunan pada akhirnya juga memengaruhi luas lahan RTH di Kota Bandar Lampung. Persebaran RTH publik di Kota Bandar Lampung

pada tahun 2009 berada di 11 kecamatan dari 13 kecamatan yang ada, yaitu Kecamatan Sukarame, Kedaton, Rajabasa, Tanjung Karang Barat, Tanjung Karang Pusat, Tanjung Karang Timur, Teluk Betung Utara, Teluk Betung Selatan, Panjang, Kemiling, dan Sukabumi. sedangkan RTH publik terkecil berada di Kecamatan Rajabasa dengan luas total sebesar 0,3 ha.

Luas RTH publik Kota Bandar Lampung sebesar  $\pm 2.489,80$  ha dengan persentase sebesar 12,62% dari luas wilayah. RTH publik terluas berada di Kecamatan Kemiling, sedangkan RTH publik terkecil berada di Kecamatan

Rajabasa dengan luas total sebesar 0,3 ha. Sebaran RTH publik di Kota

Bandarlampung Tahun 2009 dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Peta Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Bandar Lampung Tahun 2009

Perkembangan Kota Bandar Lampung pada tahap selanjutnya setelah tahun 2009 mengalami perkembangan cukup pesat. Pada tahun 2012, tercatat luas RTH publik Kota Bandar Lampung sebesar 2.185,59 ha atau 11,08% dari total luas wilayah. Luasan tersebut mengalami penurunan dari tahun 2009. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan, maka Kota Bandar-lampung mengalami pemekaran wilayah menjadi 20 kecamatan dan 126 kelurahan. Pada tahun 2012 RTH publik di Kota Bandar Lampung tersebar di 14 kecamatan dari 20 kecamatan yang ada.

Kecamatan di Kota Bandar Lampung yang memiliki RTH publik antara lain Kecamatan Kedaton, Rajabasa, Labuhan Ratu, Sukarame, Way

Halim, Kemiling, Tanjung Karang Barat, Tanjung Karang Pusat, Tanjung Karang Timur, Enggal, Teluk Betung Selatan, Teluk Betung Utara, Sukabumi, dan Panjang. Sementara itu, kecamatan-kecamatan yang tidak memiliki RTH publik yaitu Kecamatan Tanjung Seneng, Langkapura, Teluk Betung Barat, Kedamaian, Bumi Waras, dan Teluk Betung Timur.

Memasuki Tahun 2015, RTH publik di Kota Bandar Lampung mengalami penurunan sebesar 4,61 ha. Dengan perubahan yang ada maka luas RTH publik Kota Bandar Lampung sebesar  $\pm 2.121,22$  ha. Tidak ada perubahan yang cukup signifikan pada tahun tersebut, jumlah persebaran RTH publik tidak jauh berbeda dengan persebaran pada tahun 2012. Perubahan yang terjadi di sekitar wilayah Kecamatan Kemiling.

## 2. Perubahan Penggunaan Lahan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Bandarlampung Tahun 2009-2015

Identifikasi dan analisis perubahan RTH publik di Kota Bandarlampung dilakukan pada tiga titik pengamatan, yaitu pada tahun 2009, 2012 melalui peta, dan tahun 2015 melalui survei. Luas wilayah Kota Bandarlampung

sebesar 19.722 ha terbagi menjadi 13 kecamatan pada tahun 2009 dan 20 kecamatan pada tahun 2012 karena pada tahun tersebut terjadi pemekaran. Sepanjang tahun tersebut telah terjadi beberapa perubahan penggunaan lahan RTH publik di Kota Bandarlampung. Secara umum dinamika perubahan luas lahan RTH publik pada tahun 2009 dan 2012 dapat dilihat pada Tabel 2.

**Tabel 2.** Dinamika Luas RTH Kota Bandarlampung Tahun 2009-2012

No.	Tahun	Luas Kota Bandar Lampung	Luas RTH (ha)	Persentase
1.	2009	19.722	2.489,80	12,62%
2.	2012	19.722	2.185,59	11,08%
<b>Selisih Luas Lahan</b>			<b>304,21</b>	<b>1,54%</b>

Sumber:- Dinas Tata Kota Bandar Lampung, BPN Kota Bandarlampung, analisa Tahun 2009  
- Bappeda Kota Bandar Lampung Tahun 2012

Dari Tabel 2 dapat diketahui luasan RTH publik tahun 2009 sebesar 2.489,80 ha dengan persentase terhadap luas wilayah Kota Bandarlampung sebesar 12,62%. Sedangkan luasan RTH publik tahun 2012 sebesar 2.185,59 ha dengan persentase terhadap luas wilayah Kota Bandarlampung sebesar 11,08%. Berdasarkan perbandingan tersebut, dapat dilihat bahwa terjadi penurunan luas lahan sebesar 304,21 ha dari tahun 2009 sampai pada tahun 2012.

Penurunan luas RTH publik yang terjadi sebagian besar karena banyaknya pembangunan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung maupun pihak swasta. Hal tersebut dapat dilihat secara kasat mata terhadap beberapa perubahan fisik Kota Bandarlampung dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Selain itu, terjadinya alih fungsi lahan atas kebijakan pemerintah daerah juga

menjadi penyebab menurunnya luasan lahan RTH publik di Kota Bandarlampung.

Jika berdasarkan analisis *overlay* Peta Sebaran RTH publik Kota Bandarlampung tahun 2009-2012, perubahan penggunaan lahan RTH terjadi pada tujuh kecamatan (berdasarkan jumlah kecamatan tahun 2012), yaitu Kecamatan Sukarame, Kemiling, Way Halim, Tanjung Karang Barat, Enggal, Bumi Waras, dan Panjang. Hasil perhitungan area pada aplikasi *ArcView* di area *overlay* RTH publik Kota Bandarlampung tahun 2009 dan 2012 yang berkurang seluas  $\pm 358,59$  ha. Perbedaan selisih luas antara hasil *overlay* peta dengan data pada Tabel 2 dapat terjadi karena proses *digitasi* yang tidak selamanya tepat sesuai titik di lapangan. Luasan yang terjadi secara kuantitatif setiap kecamatan yang mengalami perubahan dapat dilihat pada Tabel 3.

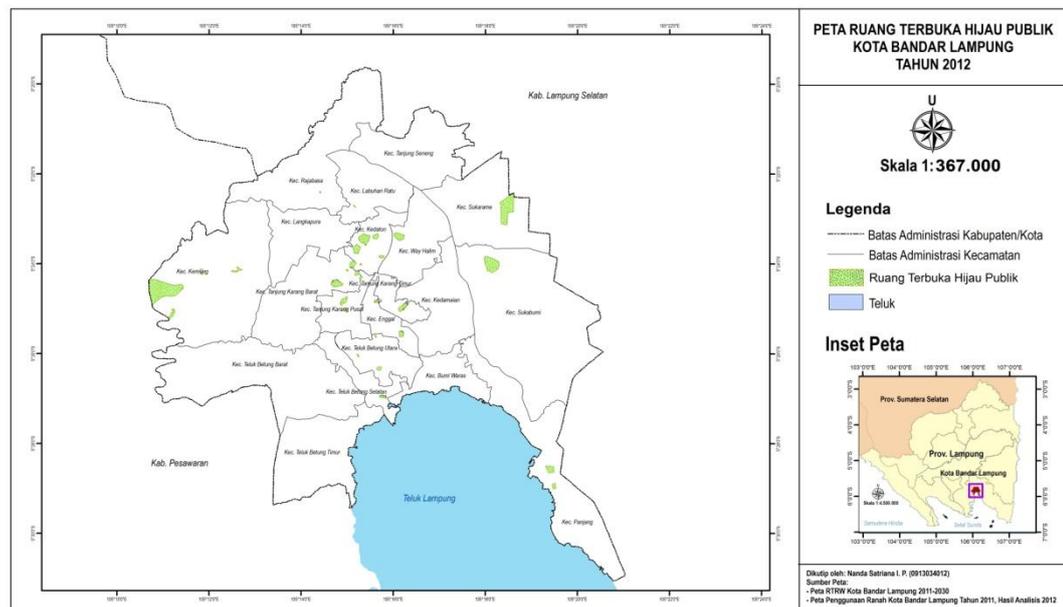
**Tabel 3.** Perubahan Penggunaan Lahan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Bandarlampung Tahun 2009-2012

No.	Kecamatan	Wilayah Sebaran RTH	Luas Perubahan Lahan RTH Publik (ha)
1.	Sukarame	Timur	15,77
2.	Way Halim	Pusat	37,71
3.	Tanjung Karang Barat	Pusat	0,21
4.	Enggal	Pusat	12,09
5.	Kemiling	Barat	283,44
6.	Bumi Waras	Selatan	4,72
7.	Panjang	Selatan	4,66
<b>Jumlah</b>			<b>358,59</b>

Sumber: Hasil analisis overlay Peta Sebaran RTH Publik Kota Bandarlampung Tahun 2009 dan Tahun 2012

Perubahan penggunaan lahan RTH publik Kota Bandarlampung tahun 2009-2012 tidak hanya menunjukkan adanya penurunan luas lahan, tetapi juga ada sebagian yang menunjukkan

adanya penambahan lahan yang terjadi di Kecamatan Kemiling seluas  $\pm 9,31$  ha. Gambaran RTH publik Kota Bandarlampung Tahun 2012 dapat dilihat pada Gambar 2.



**Gambar 2.** Peta Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Bandarlampung Tahun 2012

Kondisi perubahan penggunaan lahan RTH publik di Kota Bandarlampung yang cukup besar pada tahun 2009-2012 tidak terjadi pada tahun 2015. Namun, secara akumulatif jika dihitung dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2015,

maka dapat dilihat perubahan yang cukup besar dalam waktu lima tahun terakhir. Dinamika perubahan penggunaan lahan RTH publik di Kota Bandarlampung pada tahun 2009-2015 dapat dilihat pada Tabel 4.

**Tabel 4.** Dinamika Luas RTH Publik di Kota Bandarlampung Tahun 2009-2015

No.	Tahun	Luas Wilayah	Luas RTH (ha)	Persentase
1.	2009	19.722	2.489,80	12,62%
2.	2015	19.722	2.121,22	10,75%
<b>Selisih Luas Lahan</b>			<b>368,58</b>	<b>1,87%</b>

Sumber: Analisis overlay Peta Sebaran RTH Publik Kota Bandarlampung Tahun 2009-2015

Berdasarkan Tabel 4 maka dapat dilihat bahwa telah terjadi penurunan luas lahan sebesar 368,58 ha atau sebesar 1,87% dari luas total wilayah keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi perkembangan pembangunan yang cukup pesat pada

kurun waktu tersebut, sehingga menyebabkan beberapa lahan RTH publik berkurang. Sedangkan kondisi perubahan penggunaan lahan RTH publik di Kota Bandarlampung Tahun 2009-2015 dapat dilihat pada Tabel 5.

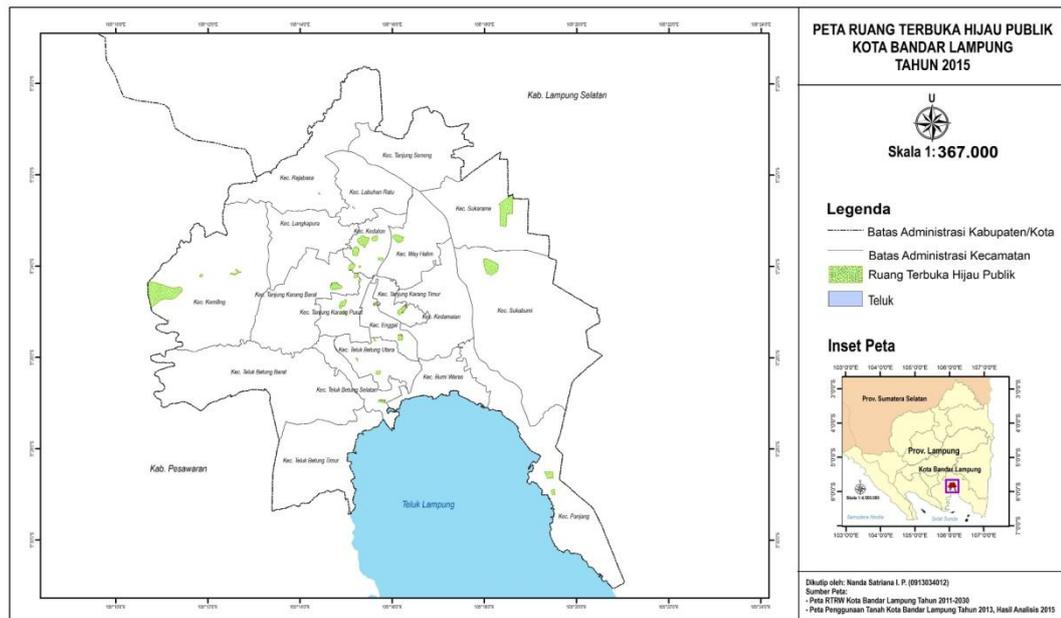
**Tabel 5.** Perubahan Penggunaan Lahan RTH Publik di Kota Bandarlampung Tahun 2009-2015

No.	Kecamatan	Wilayah Sebaran RTH	Luas Perubahan Lahan RTH Publik (ha)
1.	Sukarame	Timur	15,77
2.	Way Halim	Pusat	37,71
3.	Tanjung Karang Barat	Pusat	0,67
4.	Enggal	Pusat	12,09
5.	Kemiling	Barat	292,96
6.	Bumi Waras	Selatan	4,72
7.	Panjang	Selatan	4,66
<b>Jumlah</b>			<b>368,58</b>

Sumber: Hasil analisis overlay Peta Sebaran RTH Publik Kota Bandarlampung Tahun 2009-2015

Jika berdasarkan Tabel 5, maka terlihat total perubahan luas lahan RTH publik di Kota Bandarlampung pada tahun 2009-2015 sebesar  $\pm 368,58$  ha atau 1,8% dari total luas wilayah. Luasan tersebut didapat dengan menghitung selisih area pada peta *overlay* sebaran RTH publik Kota Bandarlampung tahun 2009-2015 melalui aplikasi *ArcView* sehingga jika berdasarkan hasil analisis tersebut dan dikurangi dengan kondisi luas RTH publik di Kota Bandarlampung tahun 2009,

maka luas total lahan RTH publik tahun 2015 sebesar  $\pm 2.121,22$  ha atau sebesar 10,75% dari luas total wilayah Kota Bandarlampung. Akan tetapi jika dibandingkan dengan luas RTH publik tahun 2012, maka telah terjadi penurunan sebesar 64,37 ha. Hal ini menunjukkan kecenderungan RTH publik di Kota Bandarlampung yang semakin mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Gambaran RTH publik Kota Bandarlampung Tahun 2015 dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Peta Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Bandar Lampung Tahun 2015

### 3. Perubahan Penggunaan Lahan RTH Publik Kota Bandar Lampung berdasarkan wilayah

#### a. Perubahan Penggunaan Lahan RTH Publik Kota Bandar Lampung pada Wilayah Timur

Perubahan penggunaan lahan di wilayah timur terjadi hanya pada Kecamatan Sukarame. Bentuk RTH publik di Kecamatan Sukarame pada tahun 2009 berupa hutan kota. Dalam perkembangannya area tersebut berubah fungsi menjadi kawasan cadangan pengembangan. Lahan seluas 15,77 ha sampai dengan saat ini hanya berupa kawasan cadangan pengembangan yang siap dikembangkan oleh pihak swasta.

#### b. Perubahan Penggunaan Lahan RTH Publik Kota Bandar Lampung pada Wilayah Pusat

Wilayah pusat Kota Bandar Lampung merupakan wilayah dengan kecamatan terbanyak yang mengalami perubahan penggunaan lahan RTH publik. Tercatat ada tiga kecamatan

yang mengalami perubahan penggunaan lahan RTH publik, yaitu Kecamatan Way Halim, Tanjung Karang Barat, dan Enggal. Total luas wilayah perubahan yang terjadi dari tahun 2009-2015 pada wilayah ini sebesar  $\pm 48,85$  ha.

Perubahan penggunaan lahan RTH publik yang cukup terlihat terjadi di Kecamatan Way Halim, dimana area tersebut bersama dengan RTH publik yang berada di Kecamatan Sukarame merupakan RTH hutan kota. Perubahan terjadi secara menyeluruh di area ini sehingga dapat dikatakan area RTH hutan kota yang berada di Kecamatan Way Halim dan Sukarame pada tahun 2015 secara total mengalami perubahan penggunaan lahan.

Kecamatan yang juga mengalami perubahan total pada RTH publik adalah Kecamatan Enggal. Kecamatan ini pada tahun 2009 memiliki lahan RTH publik seluas 17,02 ha, sedangkan pada tahun 2015 lahan RTH publik yang ada hanya sekitar 2,55 ha. Hal ini menunjukkan adanya perubahan penggunaan lahan

seluas  $\pm 14,47$  ha yang terjadi. Bentuk RTH publik yang mengalami perubahan di Kecamatan Enggal yaitu berupa taman kota.

Perubahan juga terjadi di Kecamatan Tanjung Karang Barat. Perubahan lahan RTH yang terjadi beralih menjadi kawasan pemukiman, dimana sebelumnya area tersebut berupa bentang lahan perbukitan seluas  $\pm 5,08$  ha, dan pada tahun 2015 lahan yang tersisa sebesar  $\pm 4,88$  ha. Selain itu, lahan RTH publik yang juga secara total telah berubah menjadi pemukiman terjadi seluas  $\pm 0,46$  ha.

c. Perubahan Penggunaan Lahan RTH Publik Kota Bandar Lampung pada Wilayah Selatan

Pada wilayah selatan perubahan penggunaan lahan RTH publik terjadi di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Bumi Waras dan Kecamatan Panjang. RTH publik di Kota Bandar Lampung yang mengalami perubahan penggunaan lahan total juga terjadi di Kecamatan Bumi Waras. Lahan seluas 4,72 ha berupa bukit ini telah berubah menjadi kawasan pengembangan dan kepemilikan lahan telah beralih ke pihak swasta. Kini lahan bukit tersebut telah banyak dikeruk untuk kepentingan swasta dan sebagian lahan diperuntukkan sebagai cadangan untuk pengembangan wilayah sektor perekonomian.

Alih fungsi lahan atau perubahan penggunaan lahan RTH publik di Kota Bandar Lampung yang sebagian areanya berubah terjadi pada area RTH publik di Kecamatan Panjang yang beralih fungsi menjadi terminal.

Lahan seluas  $\pm 4,66$  ha telah beralih menjadi terminal, dimana sebelumnya lahan tersebut berupa RTH Taman Pemakaman Umum. Sebagian lahan tersebut masih berfungsi sebagai Taman Pemakaman Umum dan lahan terbuka hijau lainnya yang telah berubah menjadi lahan terbangun, seperti rumah dan pertokoan.

d. Perubahan Penggunaan Lahan RTH Publik Kota Bandar Lampung pada Wilayah Barat

Area terluas yang mengalami perubahan terjadi di wilayah barat Kota Bandar Lampung yaitu pada Kecamatan Kemiling, hampir 60% area RTH berupa Hutan Rakyat dan Hutan Kemasyarakatan berkurang dan beralih fungsi penggunaan lahan. Setidaknya lahan seluas  $\pm 302,27$  ha telah mengalami perubahan dan tidak sesuai dengan RTRW yang ada. Kondisi ini memperlihatkan bahwa Kecamatan Kemiling mengalami perkembangan pembangunan dari aspek ekonomi maupun sosial.

Secara umum lahan RTH publik di Kecamatan Kemiling yang berupa hutan rakyat dan hutan kemasyarakatan beralih fungsi menjadi perkebunan warga, tanah terbuka yang bersifat sementara, dan perumahan, sedangkan ada tutupan lahan baru seluas 9,31 ha sehingga secara keseluruhan lahan RTH Publik yang berkurang seluas  $\pm 292,96$  ha. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan wilayah di Kecamatan Kemiling sangat pesat baik dari aspek pembangunan maupun penduduk.

#### **4. Faktor-faktor Penyebab Perubahan Penggunaan Lahan RTH Publik di Kota Bandarlampung**

Perubahan yang terjadi pada RTH publik di Kota Bandarlampung, memiliki pendekatan yang dilakukan untuk melihat faktor-faktor penyebab perubahan penggunaan lahan RTH publik adalah dengan menggunakan analisis digital peta perubahan penggunaan lahan RTH publik Kota Bandarlampung. Jika dilihat dari bentuk perubahan penggunaan lahan RTH publik yang terjadi di Kota Bandarlampung, setidaknya ada enam bentuk perubahan penggunaan lahan yang terjadi, yaitu menjadi cadangan pengembangan, pemukiman, perkebunan rakyat, tanah terbuka sementara, kawasan terbangun, dan terminal. Perubahan tersebut terjadi tidak hanya berupa pengurangan lahan, tetapi ada juga yang berupa alih fungsi lahan secara keseluruhan.

Ada beberapa bentuk perubahan penggunaan lahan RTH publik yang terjadi, tiga perubahan penggunaan lahan merupakan bentuk dari kebijakan pemerintah daerah, yaitu cadangan pengembangan, kawasan terbangun, dan terminal, sedangkan perubahan berupa pemukiman, perkebunan rakyat, dan tanah terbuka sementara merupakan hasil aktivitas warga. Namun, hal tersebut tetap memperlihatkan lemahnya penjagaan kawasan RTH publik oleh pemerintah.

Beralihnya fungsi Taman Hutan Kota yang berada di Kecamatan Way Halim dan Sukarame menjadi kawasan cadangan pengembangan disebabkan adanya sengketa lahan.

Pada tahun 2009, lahan yang ada masih belum memiliki kejelasan status hukum atas kepemilikan tanah sehingga pemerintah daerah Kota Bandarlampung berinisiatif untuk menanam pohon serta menata kawasan menjadi Taman Hutan Kota. Akan tetapi, dalam perkembangannya, pemilik lahan dari pihak swasta kembali mengambil alih kawasan tersebut lalu dikembangkan menjadi kawasan perekonomian dan cadangan pengembangan.

RTH publik yang mengalami perubahan menjadi kawasan cadangan pengembangan juga terjadi pada RTH di Kecamatan Enggal dan Bumi Waras. Kawasan tersebut beralih fungsi atas kebijakan pemerintah daerah sebagai bentuk pengembangan wilayah Kota Bandarlampung.

Peran pemerintah daerah yang berakibat pada berkurangnya lahan RTH publik juga terjadi di Kecamatan Panjang. Lahan seluas  $\pm 13,93$  ha sebagian berubah menjadi terminal dan kawasan terbangun.

Selain peran pemerintah dalam mengembangkan pembangunan, masyarakat juga berperan dalam terjadinya pengurangan lahan RTH publik di Kota Bandarlampung. Dalam penelitian yang dilakukan, setidaknya lahan RTH publik berubah menjadi pemukiman dan perkebunan di Kecamatan Tanjung Karang Barat dan Kemiling. Lahan RTH publik di Kecamatan Kemiling seluas  $\pm 221,05$  ha telah berubah menjadi kawasan perkebunan rakyat.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasarkan hasil pemetaan dan analisis yang telah dilakukan, dapat diambil simpulan bahwa:

1. Terjadi perubahan penggunaan lahan Ruang Terbuka Hijau publik pada tahun 2009 sampai tahun 2012 seluas  $\pm 358,59$  (berdasarkan perhitungan area melalui aplikasi *ArcView 3.1*) dan tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 mengalami perubahan penggunaan lahan sebesar  $\pm 9,99$  ha sehingga perubahan yang terjadi dari tahun 2009 sampai tahun 2015 sebesar  $\pm 368,58$  ha atau sebesar 1,87%. Perubahan terjadi di tujuh kecamatan, yaitu Kecamatan Way Halim, Sukarame, Tanjung Karang Barat, Enggal, Kemiling, Bumi Waras, dan Panjang. Perubahan penggunaan lahan yang terjadi berupa kawasan cadangan pengembangan, pemukiman, perkebunan rakyat, tanah terbuka sementara, terminal, dan kawasan terbangun.
2. Penyebab perubahan penggunaan lahan RTH publik di Kota Bandar Lampung disebabkan kebijakan pembangunan oleh

pemerintah daerah, pengembangan wilayah oleh pihak swasta, berdirinya pemukiman oleh masyarakat, dan terbentuknya perkebunan rakyat pada lahan RTH publik sehingga pemerintah daerah, pihak swasta, dan masyarakat memiliki peran dalam perubahan penggunaan lahan RTH publik yang terjadi.

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, saran yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah daerah untuk dapat kembali memperjelas status lahan RTH khususnya Taman Hutan Kota dan bila perlu mengambil alih sebagian lahan di kawasan tersebut untuk dikembalikan fungsinya.
2. Perlu adanya pengelolaan lahan RTH publik yang baik agar tidak berkurang setiap tahunnya.
3. Perlu adanya peningkatan jumlah RTH publik di Kota Bandar Lampung khususnya di kecamatan-kecamatan yang menjadi kawasan resapan air dan kawasan dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi.

## DAFTAR RUJUKAN

- Budiharjo. 1999. Kota Berkelanjutan. Semarang: P.T. Alumni.
- Purnomohadi. 2006. *Ruang Terbuka Hijau Sebagai Unsur Utama Tata Ruang Kota*. Jakarta: Direktorat Jenderal
- Penataan Ruang, Departemen Pekerjaan Umum.
- Sugiharto. 2007. *Pembangunan dan Pengembangan Wilayah*. Medan: USU Press.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Trancik, Roger. 1986. *Finding Lost Space, Theories of Urban Design*. New York: Van Nostrand Reinhold Company.